

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tindakan Sosial Max Weber

1. Tindakan sosial

Pada kehidupan sehari-hari seseorang secara sadar melakukan sebuah tindakan yang memiliki tujuan tertentu. Tindakan yang dilakukan seseorang pada umumnya tindakan berkaitan dengan individu lain. Hal ini dikarenakan manusia merupakan makhluk sosial. Tindakan sosial tidak bisa dikatakan tindakan jika tidak memiliki tujuan dan berkaitan dengan individu lain, hal tersebut dijelaskan oleh Max Weber dalam teorinya, yaitu tindakan sosial.

Max Weber membedakan antara tindakan dan perilaku reaktif murni yang didasarkan pada konsepsinya tentang tindakan sosial. Pada konsep perilaku, intervensi antara stimulus dan respons hanya sedikit yang muncul sebab perilaku tidak melibatkan proses berpikir. Faktor tersebut menyebabkan Max Weber tidak tertarik pada perilaku seperti itu. Max Weber lebih tertarik pada tindakan yang sangat jelas melibatkan intervensi proses berpikir dengan terjadinya stimulus dan respons.²⁰ Tindakan sosial yang dimaksud oleh Max Weber adalah tindakan individu yang mempunyai sebuah makna dan memengaruhi individu lain. Tindakan individu dan tindakan sosial memiliki perbedaan yang cukup mencolok.

²⁰ Geogre Ritzer, Jeffrey Stepnisky, *“Teori Sosiologi Klasik”*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019) hlm. 266.

Tindakan individu hanya berimplikasi pada dirinya sendiri sedangkan tindakan sosial berimplikasi kepada individu lain. Tindakan sosial harus ditujukan kepada individu lain jika ingin dikatakan tindakan sosial.²¹

Weber dan Durkheim memiliki pemahaman yang berbeda tentang sosiologi. Weber lebih menekankan pada tindakan sosial yang secara jelas menampilkan kehidupan didasarkan pada motivasi individu dan tindakan sosialnya, sedangkan Durkheim menekankan pada fakta sosial. sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta sosial dan bersifat eksternal, memaksa individu lain, dan fakta sosial harus dijelaskan lagi dengan fakta sosial lainnya. Durkheim melihat kenyataan suatu hal yang mengatasi individu dan berada pada tingkat yang bebas, sedangkan Weber melihat kenyataan sebagai suatu hal yang didasarkan pada sebuah motivasi dari individu dan tindakan sosial.²² Tindakan sosial yang dimaksud oleh Weber, yaitu tindakan yang diarahkan kepada individu lain secara nyata.

Max Weber mengemukakan tujuh ciri pokok yang menjadi sasaran penelitian sosiologi, yaitu tindakan individu menurut seorang aktor memiliki sebuah makna subyektif meliputi berbagai tindakan yang nyata, tindakan nyata dan bersifat membatin sepenuhnya bersifat subjektif, tindakan diarahkan ke satu individu atau ke beberapa individu, tindakan meliputi pengaruh positif dari suatu individu, tindakan itu memberikan perhatiannya kepada tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain, tindakan yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang oleh aktor, dan

²¹ George Ritzer, Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi*. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008) hlm 135.

²² Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. (Jakarta: Gramedi Pustaka, 1994), hlm 214.

tindakan yang dilakukan oleh aktor dengan persetujuan secara pasif.²³ Tujuh ciri pokok yang dikemukakan oleh Max Weber dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan sosial memiliki makna subjektif, diarahkan kepada individu lain, mempunyai pengaruh kepada orang lain dan terdapat tindakan yang merupakan respons terhadap tindakan orang lain.

Tindakan sosial bisa terjadi jika individu meletakkan makna subjektif pada tindakannya, baik bermakna untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Tindakan sosial yang dilakukan individu menciptakan hubungan sosial. Menurut Weber hubungan sosial merupakan tindakan memiliki aktor yang berbeda-beda serta mengandung makna yang dihubungkan dan diarahkan kepada tindakan individu lain. Masing-masing individu saling berinteraksi dan menanggapi. Tindakan sosial dan hubungan sosial memiliki bentuk-bentuk empiris didalamnya. Weber membedakan dua jenis dan dibagi sesuai dengan masing-masing kaitannya serta menggunakan tindakan rasional dan emosional. Jenis pemahaman langsung, yaitu dengan memahami sesuatu tindakan dengan pengamatan langsung. Pemahaman bersifat penjelas, dalam tindakan ini aktor ditempatkan pada suatu penjelasan dari kenyataan langsung dari perilaku dalam suatu tindakan khusus.

2. Tipe tindakan sosial

Rasional merupakan konsep dasar yang digunakan oleh Weber untuk mengelompokan tipe tindakan dasar sosial. Pada konsep

²³ George Ritzer. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigama Ganda*.(Jakarta: Rajawali, 2004), hlm 39.

rasionalitas, Max Weber mengemukakan bahwa individu melakukan tindakan berdasarkan pengalaman, persepsi, pemahaman atas suatu objek dalam situasi tertentu. Tindakan sosial selalu berhubungan dengan interaksi sosial hal ini dikarenakan sebuah tindakan tidak dapat dikatakan tindakan jika individu tersebut tidak mempunyai tujuan dalam melakukan tindakan tersebut. Rasionalitas dapat dipahami sebagai individu yang distributor yang akan selalu memaksimalkan yang diterima dari aktivitas produktifnya dan hubungan pertukaran yang dianggap sebagai keteraturan sosial adalah resultan kompleks dari tindakan individu.²⁴

Konsep rasionalitas merupakan kunci untuk menganalisa secara objektif mengenai arti subjektif dan dasar perbandingan mengenai jenis tindakan sosial yang berbeda-beda. Melalui pendekatan objektif aktor hanya berhubungan dengan gejala yang bisa diamati, seperti benda fisik dan perilaku nyata, sedangkan pendekatan subjektif berusaha untuk memperhatikan gejala yang sulit diamati, seperti perasaan, pemikiran dan motif-motif lainnya. Perbandingan juga terlihat sangat jelas, pendekatan subjektif melihat hubungan mengalami pengalaman objektif pribadi individu yang dimiliki bersama dengan suatu kelompok sosial, dapat dimengerti karena dialami secara bersama dan meluas, dapat dilihat sebagai subjektif, sedangkan pengalaman subjektif tidak bisa dikomunikasikan dan dimengerti, tetapi tidak bisa ditangkap sebagai pengalaman pribadi yang benar-benar subjektif, meskipun sangat nyata

²⁴ Jhon Scoot, "*Teori Sosial*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), Hal. 121.

bagi orang yang bersangkutan.²⁵ Max Weber mengklasifikasikan empat jenis tindakan dasar sosial yang memengaruhi tindakan aktor.

a) Rasionalitas nilai (*Werk Rational*)

Tindakan merupakan tindakan yang dilakukan dengan memulai pemikiran secara rasional yang memperhatikan nilai-nilai etis, estetis, religius yang terlepas dari prospek keberhasilannya. Tindakan ini hampir sama dengan tindakan rasionalitas instrumental. Tindakan yang dilakukan oleh aktor melalui pertimbangan yang matang dan mempunyai tujuan yang jelas, tetapi setiap tindakannya diselipkan nilai-nilai agama, hukum dan nilai-nilai lainnya. Nilai-nilai yang terdapat dalam hubungan bersifat absolute. Tindakan rasionalitas nilai mempertimbangkan alat yang akan digunakan untuk mencapai nilai yang sudah ada di dalam masyarakat. Tindakan sosial ini tidak terlalu memikirkan penilaian masyarakat tentang kriteria baik dan benar, tetapi tindakan sosial lebih mempertimbangkan nilai-nilai dasar yang berlaku di kehidupan masyarakat.

Nilai yang terdapat di kehidupan masyarakat berupa nilai religius, nilai etis, dan nilai hukum atau nilai lain yang menjadi keyakinan masyarakat. Setiap kelompok masyarakat dan individu memiliki keyakinan yang berbeda-beda terhadap nilai-nilai jadi tindakan sosial yang dilakukan oleh setiap aktor memiliki makna yang berbeda-beda.²⁶

²⁵ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. (Jakarta: Gramedi Pustaka, 1994), hlm 219.

²⁶ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1994), hlm 221.

b) Rasionalitas instrumental (*Zwerk Rational*)

Tindakan sosial rasionalitas instrumental memiliki tingkat rasionalitas tertinggi, dengan pilihan sadar terkait tujuan dan alat yang digunakan. Individu memiliki berbagai tujuan dan memilih alat untuk mencapainya. Bisa dikatakan bahwa tindakan rasionalitas instrumental adalah tindakan sosial yang dilakukan seseorang di dasarkan pada pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan dan alat yang tersedia yang akan dipakai untuk mencapai tujuannya.²⁷

Tindakan ini manusia melakukan suatu tindakan sosial setelah mereka melalui pertimbangan matang mengenai tujuan dan cara yang akan ditempuh untuk meraih tujuan itu. maksudnya tindakan atau perilaku yang dilakukan memang jelas untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan sosial itu sudah dipertimbangkan masak-masak tujuan dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Manusia dalam melakukan tindakan atau perilaku itu sadar akan apa yang dilakukannya dan sadar akan tujuan tindakannya.²⁸

c) Tindakan afektif (*Affectual Rational*)

Tindakan yang ditentukan oleh emosi dari aktor itu sendiri tanpa melalui pemikiran rasional. Tindakan ini dilakukan oleh aktor tanpa melalui pertimbangan, perencanaan dan tanpa kesadaran penuh.

²⁷ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*.(Gramedia Pustaka: Jakarta, 1994), 220

²⁸ GeorgeRitzer dan Douglas J Goodman. *Teori Sosiologi*(Yogyakarta : Kereasi Wacana, 1995),101

Tindakan ini bisa dikatakan reaksi spontan yang dilakukan oleh aktor.²⁹

d) Tindakan tradisional

yang ditentukan oleh cara bertindak dari seorang aktor yang lazim dilakukan tanpa melalui pemikiran lebih lanjut, karena tindakan ini sudah dilakukan sejak turun temurun. Seorang aktor melakukan tindakan hanya berdasarkan kebiasaan tanpa menyadari alasan mengenai tindakan yang dilakukan. Menurut Max Weber tindakan tradisional ini tidak melalui pemikiran yang rasional.³⁰ Tindakan sosial didasari oleh tindakan yang telah dilakukan secara turun temurun.

B. Disabilitas

1. Pengertian Disabilitas

Menurut kamus KBBI disabilitas adalah individu yang memiliki keterbatasan yang meliputi fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama sehingga mempunyai hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan mengalami keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari secara penuh³¹. Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang rentan serta berhak menerima dan memperoleh perlindungan dan perlakuan yang lebih baik dengan kekhususan yang dia

²⁹ George Ritzer, Jeffrey Stepnisky, *Teori Sosiologi Klasik*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019) hlm 267.

³⁰ George Ritzer, Douglas J Goodman “*Teori Sosiologi*” (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008) hlm. 136-138

³¹ “Arti kata disabilitas”, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas>, diakses 26 Desember 2023.

miliki. Pada pasal 5 UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ditegaskan bahwa penyandang disabilitas digolongkan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial. Hak penyandang disabilitas diatur pada UU No 19 Tahun tentang Pengesahan *Convention On The Right of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas).

Pada *Convention On The Right of Persin With Disabilities* penyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan masyarakat non disabilitas dalam segala aspek penghidupan dan kehidupan. Penyandang disabilitas merupakan SDM yang mempunyai kelebihan dan kekurangan sebagaimana manusia lainnya. Penyandang disabilitas mempunyai potensi dan dapat dikembangkan sesuai dengan talenta yang dibawa sejak lahir. Menurut Etty Papuyungan penyandang disabilitas di kategorikan ke beberapa penggolongan.³²

- a) Penyandang disabilitas menurut WHO melalui pendekatan medis penyandang disabilitas dibagi menjadi tiga, yaitu *impairment*, *disability*, dan *handicap*.
- b) Penyandang disabilitas menurut Peter Colorendge melalui pendekatan sosial penyandang disabilitas dikategorikan menjadi tiga, yaitu *disability*, *handicap*, dan *impairment*.

³² Dewi Krisna Hardjanti, "Kajian Yuridis tentang Penyandang Disabilitas" *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 16 No. 1 (Mei 2016), hal. 6.

- c) Pada manual RBM melalui pendekatan medis, sosial, pendidikan, dan keterampilan penyandang disabilitas di kategorikan menjadi sembilan kategori, yaitu gangguan belajar, gangguan kejang, gangguan wicara, gangguan pendengaran, gangguan gerak, gangguan penglihatan, gangguan perkembangan, dan gangguan tingkah laku.
- d) UU No. 4 tahun 1997 dan melalui pendekatan sosial penyandang disabilitas dikategorikan menjadi tiga, yaitu penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat ganda.

2. Klasifikasi Penyandang Disabilitas

Klasifikasi penyandang disabilitas yang sering digunakan, yaitu klasifikasi menurut pasal 1 ayat (1) UU No. 4 tahun 1997 secara khusus pada pasal ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas diklasifikasikan menjadi tiga golongan yaitu: cacat fisik, cacat mental, dan cacat ganda.

a. Penyandang disabilitas fisik

Penyandang disabilitas fisik adalah kelainan yang dimiliki oleh individu di salah satu anggota tubuhnya dan menjadi hambatan dalam melakukan kegiatan secara normal. Penyandang disabilitas fisik di kategorikan menjadi tiga yaitu:

- 1) Cacat tubuh, hal ini terjadi karena anggota tubuh yang tidak lengkap. Ketidaklengkapan pada tubuh terjadi karena kelainan sejak lahir, kecelakaan, dan akibat dari suatu penyakit sehingga menyebabkan terganggunya mobilitas individu tersebut.

- 2) Cacat rungu wicara yaitu terganggunya pendengaran dan fungsi bicara. Cacat rungu wicara disebabkan adanya kelainan sejak lahir, kecelakaan, maupun penyakit. Cacat ini terdiri dari tiga kategori yaitu: cacat rungu, cacat wicara, dan cacat rungu wicara.
- 3) Cacat netra yaitu hilang atau berkurangnya fungsi penglihatan akibat dari kecelakaan, penyakit, atau cacat bawaan lahir.

b. Penyandang disabilitas mental

- 1) Disabilitas mental retardasi adalah kecacatan yang disebabkan oleh perkembangan mental atau intelegensi yang berada di bawah rata-rata yang tidak sejalan dengan pertumbuhan usia biologinya.
- 2) Disabilitas eks psikotik adalah seseorang yang pernah mengalami gangguan jiwa.

c. Penyandang disabilitas ganda

Penyandang disabilitas ganda adalah individu yang mengalami dua jenis kecacatan sekaligus seperti disabilitas rungu-wicara, disabilitas netra-tuli, dan lain sebagainya.³³

3. Tingkat Derajat Kecacatan

Pada pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 104/Menkes/Pers/II/1999 tentang rehabilitasi Medik mengatur bahwa derajat kecacatan dinilai berdasarkan keterbatasan kemampuan seseorang

³³ Marjuki, "Penyandang Cacat Berdasarkan Klasifikasi International Classification of Functioning for Disability and Health(ICF)", *Scribd.com*, <https://id.scribd.com/doc/24613087/Penyandang-Cacat-Berdasarkan-Klasifikasi-International-Classification-of-Functioning-for-Disability-and-Health-ICF>, 30 Desember 2009, diakses tanggal 26 Desember 2023.

dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari yang dibagi menjadi enam derajat kecacatan yaitu:

- a) Disabilitas derajat cacat satu ketika difabel tersebut masih bisa melakukan aktivitas secara penuh dan mempertahankan sikap dengan kesulitan yang dialaminya.
- b) Disabilitas derajat cacat dua penyandang disabilitas mampu melakukan aktivitas dan mempertahankan sikap dengan bantuan alat bantu.
- c) Derajat cacat tiga, yaitu disabilitas mampu melakukan aktivitasnya dengan sebagian aktivitasnya memerlukan bantuan orang lain dengan atau tanpa alat bantu.
- d) Derajat cacat empat, penyandang disabilitas ini membutuhkan pengawasan orang lain dalam melakukan segala aktivitasnya.
- e) Derajat cacat lima, yaitu penyandang disabilitas tidak mampu melaksanakan aktivitasnya tanpa bantuan penuh dari orang lain dan butuh lingkungan yang khusus untuk menunjang mobilitasnya.
- f) Derajat cacat enam, yaitu penyandang disabilitas tidak mampu secara penuh melakukan aktivitas sehari-hari meskipun dibantu secara penuh oleh orang lain.

C. Aksesibilitas

1. Pengertian Aksesibilitas

Aksesibilitas adalah kemudahan yang ditujukan untuk penyandang difabel dalam mewujudkan sebuah kesamaan hak dan kesempatan dalam segala penghidupan dan kehidupan³⁴. Aksesibilitas sebagai suatu

kemudahan yang bergerak melalui dan menggunakan bangunan serta lingkungan dengan memperhatikan kelayakan dan berkaitan dengan masalah sirkulasi, dan visual. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 angka 8 Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.³⁵

2. Macam-Macam Aksesibilitas

Aksesibilitas terbagi menjadi dua macam yaitu aksesibilitas non-fisik dan aksesibilitas fisik. Aksesibilitas non-fisik berupa sebuah pelayanan publik, sedangkan aksesibilitas berupa sebuah fasilitas publik seperti masjid, trotoar, jalan raya, halte dan lainnya sebagiannya. Aksesibilitas non fisik dan fisik bisa digunakan dalam satu lingkup ruang seperti kantor, contohnya adalah pelayanan non fisik yang terdapat pada bagian resepsionis dan aksesibilitas fisik terdapat pada akses jalan untuk memasuki gedung kantor berupa tangga atau jalur khusus penyandang difabel. Aksesibilitas fisik dan non fisik dapat diibaratkan bagai mata uang koin dimana satu sisi berbeda dengan satu sisi lainnya tetapi saling melengkapi satu sama lain, hal ini sama dengan sebuah aksesibilitas jika kita ingin memberdayakan kelompok difabel.³⁶

3. Prinsip Aksesibilitas

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang Penyandang Disabilitas*, UU No.8 tahun 2016, LN No.69 Tahun 2016, TLN No.5871, pasal 10 ayat 2.

³⁶ Sapto Nugroho, Risnawati Utami, *Meretas Siklus Kecacatan-Realitas Yang Terabaikan*, (Surakarta: Yayasan Talenta, 2008), hlm. 114.

Setelah mengetahui asas-asas aksesibilitas, perlu diketahui bahwa aksesibilitas juga mempunyai prinsip-prinsip aksesibilitas. Prinsip-prinsip aksesibilitas adalah:³⁷

- a. Prinsip dasar aksesibilitas adalah tidak mengabaikan kelompok disabilitas pada saat tempat atau fasilitas publik pada saat akan merancang dan tidak ada sekelompok disabilitas yang dihilangkan atau dikurangi hak kesempatan menikmati dan keikutsertaannya dalam menggunakan fasilitas publik.
- b. Prinsip perencanaan aksesibilitas. (*Barrier free principle*) prinsip pokok awal (sederhana, jelas). Semua individu baik non-difabel maupun kelompok difabel harus bisa mencapai semua fasilitas publik dan semua individu bisa menggunakan fasilitas publik yang terdapat di suatu lingkungan.
- c. Prinsip perencanaan aksesibilitas (pengembangan prinsip awal), yaitu:
 - 1) Adil, yaitu desain harus bisa digunakan untuk semua masyarakat termasuk kelompok difabel tanpa ada diskriminasi di dalamnya.
 - 2) Fleksibel, yaitu desain mudah digunakan oleh semua individu baik non-difabel maupun difabel.
 - 3) Sederhana, yaitu desain yang mudah dimengerti dan tidak butuh sebuah keahlian dalam menggunakannya.

³⁷ “Aksesibilitas #3 Prinsip Aksesibilitas”, *Blogspot.com*, <https://arsiterkturadres.blogspot.com/2017/04/aksesibilitas-3-prinsip-aksesibilitas.html>, diakses pada tanggal 9 November 2022.

- 4) Mudah dipahami adalah sebuah desain yang mampu memberikan sebuah gambaran tentang cara penggunaan tanpa memerlukan sebuah kemampuan khusus seperti sensorik atau indra tertentu.
- 5) Mentolerir adanya kesalahan dalam fasilitas publik yaitu desain yang harus mengutamakan keselamatan bagi pengguna dengan memperhatikan hal-hal kecil seperti tingkat kemiringan sebuah bidang yang digunakan untuk pengguna kursi roda.
- 6) Ketepatan ukuran sebuah bidang dan ruang untuk menggunakan sebuah fasilitas publik harus diperhatikan secara detail agar pada saat pemakaian tidak memerlukan sebuah tingkatan ukuran tubuh, postur dan kemampuan mobilitas tertentu.
- 7) Tidak mengeluarkan banyak tenaga dalam pemakaiannya yaitu sebuah desain yang dapat digunakan secara efisien dan nyaman.

4. Asas Aksesibilitas

Dalam membangun sebuah aksesibilitas terdapat asas-asas yang harus diperhatikan yaitu:³⁸

- a. Kegunaan, yaitu dimana individu atau masyarakat dapat menggunakan semua fungsi bangunan atau tempat yang bersifat publik di dalam sebuah lingkungan.
- b. Kemudahan, individu dapat mencapai kemudahan dalam segala aspek fungsional yang mempunyai sifat umum di suatu lingkungan dan bangunan.
- c. Keselamatan, fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat harus memperhatikan aspek keselamatan.
- d. Kemandirian, masyarakat dapat menggunakan tempat atau bangunan secara mandiri tetapi tetap memperhatikan aspek kegunaan, kemudahan, dan keselamatan.

³⁸ Suharto dan Edi, "Penerapan Kebijakan Publik Bagi Masyarakat Dengan Kebutuhan Khusus, Pengalaman Kementerian Sosial," (makalah disampaikan pada diskusi tentang Terbatas Pusat Kajian Manajemen Pelayanan Lan Ri Di Holet Sahira Bogor, 9-10 Oktober 2008).